

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN STUNTING
DI DESA KALIRANDU, KECAMATAN PETARUKAN, KABUPATEN**

PEMALANG

Oleh :

Evalia Nuranita Putri¹, Herbasuki Nurcahyanto²

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Stunting merupakan salah satu isu nasional dimana penanggulangannya masih terus dilakukan hingga saat ini. Permasalahan *stunting* merupakan masalah jangka panjang yang berdampak pada masa depan bangsa dan menjadi beban negara, Desa Kalirandu merupakan salah satu desa yang memiliki angka *stunting* yang tinggi dan termasuk dalam desa lokus *stunting*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kolaborasi yang dibangun dalam penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuh informan sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan cukup efektif dengan melihat fenomena dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berhubungan dengan sumber daya manusia yaitu partisipasi masyarakat melalui kader *stunting* yang masih rendah, dominasi bidang kesehatan dalam penanganan *stunting* di Desa Kalirandu, rendahnya komitmen kepala desa dan masalah pengunggahan data. Faktor pendorong dalam kolaborasi ini adalah sumberdaya keuangan, ketergantungan para aktor, sejarah kerjasama, kejelasan aturan dasar, transparansi dalam kolaborasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Stunting, Governance, Isu Nasional*

¹ Mahasiswa Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

² Dosen Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

**COLLABORATIVE GOVERNANCE IN MANAGING STUNTING
IN KALIRANDU VILLAGE, PETARUKAN SUB-DISTRICT,
PEMALANG DISTRICT**

Evalia Nuranita Putri, Herbasuki Nurcahyanto

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

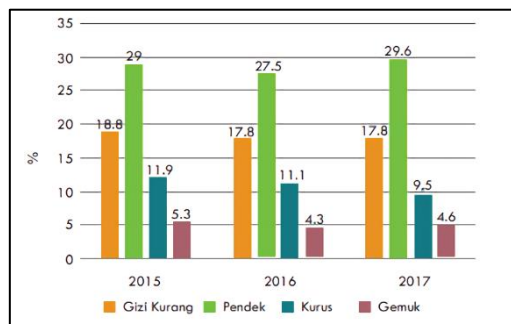
Stunting is one of the national issues where the prevention is still being done. The problem of stunting is a long-term problem that has an impact on the future of the nation and becomes a burden to the state, Kalirandu Village is one of the villages that has a high stunting rate and is included in the village of stunting locus. This study aims to understand and describe the collaboration built in the prevention of stunting in Kalirandu Village and to find out the driving and inhibiting factors that affect collaboration. This study used a descriptive qualitative research method with seven informants as research subjects. The results showed that the collaboration was quite effective by looking at the phenomenon of face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, mutual understanding and temporary results. However, there are still some inhibiting factors related to human resources, namely low community participation through stunting cadres, the dominance of the health sector in handling stunting in Kalirandu Village, low commitment by the village head and the problem of uploading data. The driving factor in this collaboration is adequate financial resources, dependence of actors, history of cooperation, clarity of ground rules, transparency in collaboration.

Keywords: Collaborative Governance, Stunting, Governance, National Issue

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 alinea IV menyebutkan bahwa salah satu tujuan pemerintahan Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Maret 2018, persentase angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%, dengan jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau pengeluaran per kapita per bulan mencapai 25,95 juta. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, rendahnya kualitas hidup menyebabkan buruknya tingkat kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada produktivitas itu artinya akan menambah beban ketergantungan pada pemerintah.

Salah satu masalah kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan adalah gizi, apabila gizi tidak tercukupi akan menyebabkan gizi buruk. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kekurangan gizi (malnutrisi), yang sebagian besar berkaitan dengan asupan pola makan yang buruk, infeksi penyakit yang parah dan berulang, terutama pada masyarakat kurang mampu.



Gambar 1.1 Masalah Gizi di Indonesia Tahun 2015-2017

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Pemantauan Status Gizi 2018

Masalah gizi yang saat ini dialami di Indonesia dengan persentase tertinggi yaitu anak yang memiliki postur tubuh pendek dimana terjadi peningkatan pada tahun 2017. Postur tubuh pendek erat kaitannya dengan *stunting*. Balita pendek (*stunting*) adalah masalah gizi secara kronis yang disebabkan oleh asupan yang kurang dalam kurun waktu yang relatif lama biasanya asupan makanan tidak memenuhi kebutuhan gizi, dan keterlambatan perkembangan dimulai di dalam rahim dan terlihat ketika anak berusia dua tahun. *Stunting* merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang menjadi program nasional dan masih terus diperbaiki hingga saat ini karena *Stunting* menjadi salah satu indikator keberhasilan kesejahteraan masyarakat meliputi pendidikan dan juga pendapatan.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2019 persentase *stunting* di Indonesia 27,67%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dianggap kronis apabila prevalensi *stunting* lebih dari 20%. WHO juga pernah menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi *stunting* tertinggi di Asia tahun 2017. Di Jawa tengah tahun 2017 persentase *stunting* 23,9%.

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang menjadi prioritas penanggulangan *Stunting* adalah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2019 Kabupaten Pemalang tergolong kedalam empat belas zona merah kabupaten miskin di Jawa Tengah dimana menempati urutan ke empat yaitu dengan jumlah penduduk miskin 200,7 ribu jiwa atau 15,41% dibandingkan data tahun 2018 yang menduduki peringkat ke 6 itu artinya kemiskinan di Pemalang meningkat berkorelasi pada tingkat kesejahteraan di Pemalang.

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Balita <i>Stunting</i> (Anak)	Persentase (%)
1	Moga	Mandiraja	9	7,14
2		Wangkelang	6	4,76
3		Longkeyang	6	4,76
4	Bodeh	Parunggalih	10	7,94
5		Kebandungan	2	1,59
6	Bantarbolang	Purana	8	6,35
7	Pemalang	Tambakrejo	16	12,70
8	Petarukan	Kalirandu	35	27,78
9	Ampelgading	Losari	9	7,14
10	Comal	Tumbal	25	19,84
TOTAL			126	100

Tabel 1.1 Jumlah Balita *Stunting* di 10 Desa Kabupaten Pemalang, Mei 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Mei 2019 (Telah diolah kembali)

Persebaran balita penderita *Stunting* di 10 desa yang tersebar di 7 kecamatan, Kabupaten Pemalang sendiri terdiri atas 14 kecamatan dan 7 kecamatan diantaranya memiliki angka *Stunting* yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan yang lainnya di tabel diatas juga dapat dilihat bahwa *Stunting* yang ada di Pemalang tersebar di 10 desa yaitu diantaranya Kalirandu, Kebandungan, Longkayeng, Losari, Mandiraja, Parunggalih, Purana, Tambakrejo, Tumbal, Dan Wangkelang (lihat tabel 1.1).

Stunting menjadi salah satu prioritas permasalahan di Kabupaten Pemalang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan sebagai langkah lanjutannya Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan

Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/9611/Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* yang diharapkan memberikan kontribusi dalam menekan angka *Stunting*, terdapat 14 instansi pemerintah daerah yang terlibat didalamnya dengan adanya pihak-pihak yang terlibat disini. Dikutip dari Kepala Dinas Kabupaten Pemalang (Suara Merdeka, 19 Maret 2019) menegaskan bahwa *Stunting* sebagai persoalan kesehatan yang serius ditangani bersama-sama oleh semua pihak. Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya kerjasama antar unsur-unsur lembaga atau dengan *collaborative governance*.

Apabila ditinjau dari Buku Rencana Aksi Daerah Penanganan *Stunting* Kabupaten Pemalang Tahun 2019 pembentukan tim ini lebih banyak melibatkan instansi pemerintah, atau dengan kata lain masih minimnya keterlibatan pihak luar seperti swasta, idealnya dengan adanya keterlibatan pihak swasta akan mendorong kerjasama sehingga dapat mempercepat penurunan angka balita *Stunting* karena peran swasta penting dalam hal ini yaitu sebagai aktor pendukung atas kebijakan pemerintah. Berdasarkan penjelasan yang telah

dipaparkan, pertanyaan penelitiannya adalah “Bagaimana kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan *Stunting* di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang”.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong 2011, hlm 8) menggambarkan administrasi publik sebagai kombinasi kompleks dari teori dan praktik, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemerintah dan masyarakat yang diatur, dan mempromosikan kebijakan publik untuk merespon kebutuhan sosial lebih cepat.

Banyak para ahli yang mengkaji ilmu administrasi publik dan mempelajarinya hingga akhirnya sehingga terbentuklah banyak sudut pandang dan mengubah konsep serta tujuan dari ilmu administrasi publik itu sendiri. Berikut paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry.

- a. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)
- b. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)
- c. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
- d. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

- e. Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)
- f. Governance (1990-sekarang)

Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2007:544) *collaborative governance* adalah rangkaian penataan para lembaga publik secara langsung memasukkan pemangku kepentingan non-negara dalam perumusan atau implementasi kebijakan publik. Pengambilan ketentuan formal, berorientasi mufakat, dan musyawarah proses atau organisasi prosedur publik. *Collaborative governance* merupakan paradigma baru untuk memahami keberadaan berbagai pemangku kepentingan dalam urusan publik. Karakteristik tertentu dalam hubungan aktor membuat penelitian kolaboratif menjadi penting. Berikut nilai dasar yang ada dalam *collaborative governance*.

- a. Orientasi Konsensus
- b. Kepemimpinan Kolektif
- c. Komunikasi Multiarah
- d. Berbagi Sumberdaya

Adapun Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007:550) terdiri atas :

- a. Kondisi Awal
- b. Desain Institusional
- c. Kepemimpinan Fasilitatif
- d. Proses Kolaborasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran faktual mengenai kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

Teknik untuk memilih subjek penelitian dilakukan secara purposive yang didapatkan tujuh subjek diantaranya Perangkat Desa Kalirandu, Puskesmas Petarukan, Kader *Stunting*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan tujuh informan menggunakan pedoman wawancara, selain itu ada pengumpulan dokumen dan studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Collaborative Governance* dalam Penanggulangan *Stunting* di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang**

Menurut Ansell dan Gash fenomena proses kolaboratif merupakan inti dari model yang mereka kemukakan. Dalam penelitian ini, proses kolaboratif

digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan kolaborasi dalam penanggulangan masalah *stunting* di Desa Kalirandu.

a. Dialog Tatap Muka

Dialog secara intensif untuk penanganan *stunting* yang dimulai dari kegiatan (Musyawarah Masyarakat Desa) MMD yang diselenggarakan oleh puskesmas melibatkan pemerintah desa, masyarakat sekitar Desa Kalirandu, dan Bappeda hingga terciptanya kegiatan kelas *stunting* yang dilakukan setiap satu bulan sekali di Balai Desa Kalirandu. Kegiatan kelas *stunting* ini dilakukan oleh kader *stunting* dan petugas gizi dari puskesmas, dengan adanya kegiatan ini juga meningkatkan intensitas komunikasi serta membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Namun, dalam keberjalanannya kegiatan ini belum melibatkan pihak swasta/sector privat dan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah.

b. Membangun Kepercayaan

Kegiatan kelas *stunting* telah membangun kepercayaan yang cukup efektif dilihat dari tingginya intensitas komunikasi yang berlangsung. Selain itu puskesmas juga mengadakan komunikasi dengan pihak luar di sekitar Kecamatan Petarukan empat (4) kali dalam satu tahun

yang bertujuan agar penekanan angka *stunting* lebih cepat dan masif. Membangun kepercayaan juga ditunjukkan dengan pelaksanaan uraian tugas pokok dan fungsi diantara para aktor yang terlibat.

c. Komitmen dalam Proses

Komitmen dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* ditunjukkan dengan adanya motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kolaborasi melalui peraturan yang berlaku, selain itu telah adanya bentuk keseriusan yang diwujudkan dalam bentuk semangat dan usaha yang dilakukan oleh para *stakeholder* serta cukup berperannya instansi di tingkat kabupaten yang ikut andil dalam penanganan *stunting* ini serta Komitmen terhadap proses dilihat Dengan adanya kerja keras dalam membangun kepercayaan para aktor yang terlibat dalam kolaborasi

d. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dibangun melalui tujuan penanggulangan *stunting* berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2019 serta ditunjukkan dengan adanya pertemuan yang dilakukan dalam rangka untuk menyatukan persepsi dan arah kerjasama

yang sedang dan akan berjalan oleh Dinkes, Puskesmas, dan Bappeda.

e. Hasil Sementara

Hasil sementara merupakan bentuk keberhasilan suatu kolaborasi yang dirasakan secara nyata meskipun masih kecil. Dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu hasil sementara ditunjukkan dengan adanya peningkatan intensitas komunikasi diantara para *stakeholder* didorong dengan adanya kegiatan kelas *stunting* yang diadakan setiap bulan di Balai Desa Kalirandu serta adanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka untuk mendorong perekonomian khususnya keluarga balita *stunting*.

Faktor Pendorong dan Penghambat Collaborative Governance dalam Penanggulangan *Stunting* di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang

Ansell dan Gash (2007) merumuskan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literatur. Model tersebut memiliki empat fenomena penting yang dijadikan sebagai pusat perhatian. Proses kolaboratif merupakan inti dari model kolaborasi. Sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan

kepemimpinan fasilitatif dipresentasikan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi.

a. Kondisi Awal Kolaborasi

Kondisi awal suatu kolaborasi penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu dapat dilihat dari tiga poin penting yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yaitu ketidakseimbangan sumberdaya, insentif untuk berpartisipasi, dan sejarah kerjasama. Ketiga poin tersebut tentu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kondisi awal kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* bahwa masih terdapat ketidakseimbangan sumberdaya baik dari segi manusia dan keuangan, seperti partisipasi masyarakat dalam pembentukan kader *stunting* yang masih rendah dimana saat ini banyak anggota kader *stunting* yang dipilih dari kader kesehatan yang sudah ada sehingga memiliki tugas ganda, selain itu dari segi keuangan yaitu adanya ketidaksesuaian terkait pelaporan keuangan (APBDes) dimana data yang dalam peraturan kementerian desa tidak sinkron dengan yang ada di rekening sistem keuangan

desa sehingga yang masih dinilai kurang ideal.

Insentif untuk berpartisipasi bersifat sukarela sehingga dalam kolaborasi ini yang menjadi motivasi atau dorongan untuk bekerjasama adalah dengan adanya kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dan juga adanya sikap saling ketergantungan sehingga aktor satu sama lain saling membantu dalam memenuhi apa yang dibutuhkan oleh aktor lain dalam menangani masalah *stunting* di Desa Kalirandu.

Sejarah kerjasama dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* ini bukan kali pertama dilakukan dalam bidang kesehatan yang melibatkan puskesmas, pemerintah desa, dan kader *stunting* dan sejauh ini tidak terdapat aktor antagonis yang terdapat didalamnya, sehingga bukan hal sulit untuk membangun kerjasama dalam penanggulangan *stunting*.

b. Desain Institusional

Desain institusional dalam penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu dapat dilihat dua poin penting yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yaitu aturan dasar dan proses transparansi dalam kolaborasi. Aturan dasar

kolaborasi penanggulangan *stunting* adalah Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/9611/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dimana terdapat dua tim yaitu tim intervensi spesifik yang berhubungan secara langsung dimana sektor kesehatan lebih banyak andil dan tim intervensi sensitif yang tidak berhubungan secara langsung dimana melibatkan sektor-sektor lain di luar kesehatan. Kemudian sebagai upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu sebagai desa prioritas *stunting* yang memiliki angka prevalensi tertinggi adanya Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader *Stunting*.

Berkaitan dengan proses transparansi dalam kolaborasi dilakukan baik secara internal maupun eksternal namun lebih cenderung secara internal. Adanya pertemuan yang dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkan keterbukaan antar aktor yang terlibat baik yang diselenggarakan oleh puskesmas sebagai *leading sector* maupun melalui kegiatan yang rutin dilakukan salah satunya adanya pertemuan yang dilakukan diakhir kegiatan kelas *stunting*.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu dapat dilihat dari tiga poin penting yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yaitu *leading sector*, kegiatan dalam kolaborasi, dan pengawasan dalam kolaborasi. Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* yang berperan sebagai fasilitator para aktor yang terlibat. *Leading sector* juga memastikan bahwa masing-masing aktor yang terlibat dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan tujuan bersama.

Kegiatan-kegiatan dalam kolaborasi yang dilakukan seperti kegiatan kelas *stunting* yang dilakukan setiap bulan dalam rangka untuk menekan prevalensi *stunting*, rapat koordinasi dilakukan oleh puskesmas beserta lintas sektor di sekitar Kecamatan Petarukan bertujuan untuk sosialisasi mengenai masalah *stunting* sehingga para pemangku kepentingan dapat berkontribusi aktif dalam penanganan *stunting*, dan kegiatan kolaborasi lainnya yaitu kegiatan internal puskesmas petarukan, kegiatan tersebut dilakukan oleh kelima program yang berada di puskesmas petarukan yang bekerjasama satu sama lain dengan tujuan

yang sama yaitu penurunan angka *stunting*.

Salah satu fokus dari kepemimpinan fasilitatif adalah pengawasan dalam kegiatan kolaborasi. Pengawasan dinilai sangat penting untuk ditekankan karena sangat berpengaruh dengan kinerja para aktor yang terlibat. Adapun pengawasan dalam kegiatan kolaborasi ini dilakukan melalui monitoring evaluasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan bappeda. Dinas kesehatan sebagai unsur utama dalam tim intervensi spesifik penanggulangan *stunting* ini selain menerima laporan dari puskesmas setiap bulan, mereka juga melakukan monev secara langsung guna melihat keadaan di lokasi. Lain halnya bappeda yang melakukan monitoring evaluasi bekerjasama dengan dinas kesehatan menghadirkan perwakilan dari dua puluh lima (25) puskesmas untuk melihat hasil analisis mengenai penanganan *stunting* yang bertujuan untuk dijadikan acuan menyusun program dalam rangka penanganan serta pencegahan *stunting* kedepan dan juga deteksi dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan *Collaborative Governance* dalam

penanggulangan *stunting* khususnya tim intervensi spesifik (secara langsung) menurut teori Ansell dan Gash melalui fenomena proses kolaborasi dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dimulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara yang digunakan sudah berjalan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka *stunting* yang didorong dengan adanya kegiatan kelas *stunting* yang diadakan satu kali dalam sebulan di Balai Desa Kalirandu serta partisipasi para aktor yang terlibat aktif baik disekitar Kecamatan Petarukan dan di tingkat kabupaten. Selain itu terdapat hambatan dalam kolaborasi ini diantaranya keterbatasan sumberdaya manusia, komitmen kepala desa rendah, dominasi sektor kesehatan, dan masalah pengunggahan data

SARAN

1. Perlunya melibatkan peranan pihak di dalam masyarakat seperti organisasi keagamaan masyarakat (fatayat), karang taruna dan pihak di luar masyarakat dan pemerintah seperti Corporate Social Responsibility (CSR) untuk saling berperan aktif dalam

rangka percepatan penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dirasakan kader *stunting* menjadi tugas Pemerintah Desa Kalirandu dan Pemerintah Kabupaten Pemalang baik melalui Bappeda, dinas kesehatan atau dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dispermasdes) untuk memberikan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat Desa Kalirandu yang bertujuan agar masyarakat sadar dan dapat berperan aktif dalam penanggulangan *stunting*.
3. Komitmen kepala desa yang rendah dapat ditingkatkan melalui adanya teguran lisan dari aktor lainnya seperti puskesmas, dan apabila tidak ada perubahan dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pemalang seperti Bappeda dan dinas kesehatan untuk mengambil peran.
4. Dominasi sektor kesehatan dapat diminimalisir dengan cara Bappeda mengadakan pertemuan khusus untuk menyatukan para aktor yang terlibat baik dalam tim intervensi spesifik dan tim intervensi sensitif untuk bersama-sama berbagi peran dan aktif dalam penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu.

5. Masalah pengunggahan data yang dirasakan Pemerintah Desa Kalirandu dapat diatasi dengan membenahan data yang tertera dalam rekening sistem keuangan desa oleh Kementerian Desa kemudian perlu adanya sosialisasi mengenai pengunggahan data tersebut agar tidak ada kesalahpahaman.
6. Saran untuk peneliti selanjutnya khususnya yang akan meneliti mengenai penanggulangan *stunting* di Desa Kalirandu dengan teori *collaborative governance* dapat meneliti melalui tim intervensi sensitif (secara tidak langsung) untuk melihat peran diluar sektor kesehatan. Dan menggunakan teori yang lain yang sesuai seperti efektivitas yang terkait, teori perilaku, dan teori korelasi hubungan x dan y.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ansell, C. dan Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*, University of California, Berkeley: Oxford University Press.
- Azwar, Saifuddin. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Denhardt, V. dan Robert B. (2003). *The New Publik Service: Serving, not Steering*. New York: M.E Sharpe, Armonk.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Islamy, La Ode Syaiful. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Budi Utama
- Keban, T. Yeremias. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). (2017). *Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting*.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Jakarta: Media Group.
- Utomo, Warsito. (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia: perubahan paradigma dari administrasi Negara ke administrasi publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ansell, C. dan Gash, A. (2007). "Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Publik Administration Research and Theory*". Oxford Journals (*JPART*), Vol.18, 543-571..

- Arifin, Syamsul. dan Dewi, Utami.
“Collaborative Governance dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman”. Jurnal UNY, 315-330
- Ikeanyibe, Okey Marcellus dkk. (2017).
“Governance Paradigm in Publik Administration and The Dilemma of National Question in Nigeria”. Cogent Social Sciences.3.
- Febrian, Ranggi A. (2016).
“Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)”. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. II No 1
- Haryanto, Aris Tri dan Lukito. (2016).
“Collaborative Governance dalam Pengembangan Kerajinan Blankon di Kecamatan Serengan Kota Surakarta”. E-Journal JI@P Vol. 3 No.1 Januari – Juli
- Hermawan, Bagus N. (2017).
“Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah melalui Banyuwangi Ethno Carnival”. E-SOSPOL. Vol. IV Edisi 1 Januari – April
- Arianti, Devi dan Lena Satlita. (2018).
“Collaborative Governance dalam Pengembangan Konservasi Konservasi Mangrove di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul”. Jurnal NataPraja Vol. 6 No 2